

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Samudera Hindia dengan cepat menjadi kawasan yang diperebutkan oleh beberapa negara untuk menunjukkan kekuasaannya. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya kontestasi antara India dan Tiongkok, dimana Tiongkok telah melakukan langkah agresif untuk memajukan kepentingan strategisnya di kawasan Samudera Hindia dengan membangun dan meningkatkan aksesibilitas ke pangkalan militer dan pelabuhan strategis dengan menggunakan praktik ekonomi yang dianggap tidak liberal dan cenderung asertif (Rossow dan Singh 2018). Secara lebih lanjut, kehadiran Tiongkok di kawasan Samudera Hindia yang meningkat, tidak hanya menyinggung tentang peran strategis India di kawasan Samudera Hindia, tetapi juga menjadi bagian dari agenda yang ditentukan untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemain kunci di kawasan Samudera Hindia (Baruah 2019). Hal ini selanjutnya berkaitan dengan narasi besar Tiongkok yang bertujuan untuk menjadi kekuatan maritim global. Sementara itu, India tidak dapat mengizinkan Tiongkok untuk mempraktikkan pedoman yang sama yang digunakan di Laut China Selatan, serta menantang klaim teritorial dan norma-norma internasional tentang kebebasan navigasi, penerbangan, dan perdagangan tanpa hambatan di kawasan Samudera Hindia (Thakker, t.t). Fakta bahwa Tiongkok telah meningkatkan perannya di kawasan Samudera Hindia membuat India ingin mempertimbangkan kembali beberapa kekhawatiran lamanya tentang aktor eksternal di Samudera Hindia. Hal tersebut juga mendorong India untuk mengubah cara pandangya terhadap Amerika Serikat dan Sekutunya di wilayah Samudera Hindia (Trofimov 2020; Rajagopalan 2021).

Pendapatan Tiongkok yang saat ini lima kali lebih besar daripada India, serta pengeluaran pertahanan yang empat kali lebih besar daripada India menjadi salah satu alasan bagi India untuk mencari mitra eksternal untuk menjembatani kesenjangan strategis yang semakin lebar. Lebih luas lagi, India melihat proyeksi kekuatan Tiongkok yang memasuki kawasan Asia Selatan dan Samudera Hindia

sebagai hal yang merusak kepentingan regionalnya. Di sisi lain, Amerika Serikat siap mendukung India untuk kepemimpinan regional. Oleh karena itu, India tidak memiliki pilihan selain beralih ke Amerika Serikat dan Sekutunya untuk membangun keseimbangan di kawasan Asia Selatan dan Samudera Hindia (Mohan 2017). Selain itu, karena negara-negara di kawasan Asia Selatan tidak dapat menegakkan kepentingan mereka terhadap dominasi militer dan ekonomi Tiongkok yang besar, India, Amerika Serikat, Australia dan Jepang berusaha untuk membatasi kekuatan Tiongkok dalam kerangka kerja sama yang disebut Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) (Madan 2017). Menurut Perdana Menteri India Manmohan Singh, tujuan resmi dari Quadrilateral Security Dialogue adalah untuk mewujudkan "perilaku penyeimbang" dalam kebijakan luar negeri dan "pertukaran ide di antara anggota". Keempat negara tersebut menyoroti bahwa kerjasama tersebut berarti tidak ada aliansi dan tidak didirikan dengan tujuan untuk membatasi Tiongkok.

Akan tetapi, peningkatan kehadiran kekuatan Tiongkok di kawasan Samudera Hindia telah mereorganisasi Quadrilateral Security Dialogue (selanjutnya disebut QUAD 2.0). Kerjasama keamanan ini bertujuan untuk mengamankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kerjasama ini dilatar belakangi pada fakta bahwa aktivitas militer Tiongkok yang meningkat dan seringkali terlarang, serta pengaruh ekonominya yang timbul dari proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang mengancam kepentingan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan, Samudera Hindia dan Laut Cina Timur (Hui dan Hussain 2018). Di lain sisi, walaupun keempat negara menyangkal hal tersebut, terdapat narasi bahwa tujuan QUAD 2.0 adalah untuk membatasi penyebaran kekuatan dan pengaruh Tiongkok di wilayah perairan dengan bekerja sama di bidang maritim dengan menjaga navigasi dan penerbangan bebas, menegakkan prinsip hukum internasional, menyelesaikan konflik secara damai, menjaga keamanan laut dan urusan lainnya (Tatsumi 2018).

Secara lebih lanjut, sebagaimana pernyataan Narendra Modi (dalam Mohan 2015), sikap India sebelumnya mungkin mencerminkan kewaspadaan India akan adanya persaingan kekuatan besar di kawasan Samudera Hindia. Hal ini berkaitan dengan usaha untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan keamanan di kawasan serta untuk memperkuat kapasitas keamanan laut. Narendra Modi menekankan tentang peran mekanisme kelembagaan seperti Simposium Angkatan Laut Samudra Hindia dan perlunya suatu pembangunan *blue economy* secara keseluruhan, sekaligus menyerukan agar kawasan di sekitar Samudera Hindia mengambil peran kepemimpinan dalam menangani masalah perubahan iklim. Namun, Mohan (2015) berpendapat bahwa pernyataan Narendra Modi yang paling radikal dari semuanya adalah pendekatan baru terhadap peran kekuatan eksternal dalam mengamankan Samudera Hindia. Hal ini senada dengan pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi,

“Those who live in this region have the primary responsibility for peace, stability and prosperity in the Indian Ocean...we recognize that there are other nations around the world, with strong interests and stakes in the region.”¹

Dengan demikian, Narendra Modi membenarkan dan menyerukan kerjasama dengan kekuatan mitra eksternal di Samudra Hindia, termasuk Amerika Serikat, Australia, Jepang, Prancis, dan lainnya, serta negara-negara yang telah bermitra dengan India dalam melakukan dialog keamanan, latihan dan pertukaran militer. Pendekatan yang berubah mungkin merupakan pengakuan India atas fakta bahwa India menghadapi kendala kapasitas yang serius dalam mengelola sendiri Samudra Hindia, terutama mengingat prospek Tiongkok yang semakin vokal dan pemain utama di kawasan Samudera Hindia (Mohan 2015).

Akan tetapi, jauh sebelum Quadrilateral Security Dialogue mengalami perkembangan signifikan pada tahun 2017, India pada 2007 menjadi salah satu negara yang pertama kali berkontribusi pada inisiasi pembentukan Quadrilateral

¹ Dapat dilihat di <https://www.spmrf.org/our-vision-for-indian-ocean-is-sagar-security-and-growth-for-all-in-the-region/>

Security Dialogue. Perkembangan Quadrilateral Security Dialogue diawali dengan dibentuknya Tsunami Core group oleh Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia sebagai suatu bentuk kerjasama yang bertujuan untuk menanggapi dan membantu korban tsunami di kawasan pesisir Samudera Hindia pada 2004 (Madan 2017). Marc Grossman (2005) menyebut bahwa Tsunami Core Group sebagai sebuah “jenis diplomasi baru” yang menciptakan jaringan dan wadah baru yang bertujuan untuk menghadapi tantangan yang muncul, ditandai dengan keempat negara yang siap untuk memobilisasi bantuan tsunami dengan cepat. Walaupun eksistensi Tsunami Core Group tidak begitu lama, namun pembentukan kelompok tersebut meninggalkan warisan dan rekam jejak yang sukses sebagai sarana bagi negara-negara anggota untuk menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian kawasan (Buchan dan Rimland 2020). Secara lebih lanjut, kerangka kerjasama keempat negara tersebut memperoleh komponen ideologis ketika Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melalui Menteri Luar Negeri Taro Aso mengusulkan *Arc of Freedom and Prosperity* pada 2006, dimana *arc* yang dimaksudkan oleh Abe sebagai jaringan negara-negara di seluruh benua berkaitan dengan upaya diplomatik Jepang yang diperluas untuk mempromosikan kebebasan dan penegakan aturan hukum. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Taro Aso juga memberikan perhatian yang signifikan terhadap demokrasi dan sifat pasar bebas dialog empat negara di masa depan, sebagai jaringan luas (Aso 2006).

Pada Desember 2006, dalam kunjungannya ke Jepang, Perdana Menteri India Manmohan Singh, melalui pernyataan bersama, mengumumkan bahwa Jepang dan India sangat ingin memulai dialog dengan negara-negara yang memiliki pemikiran dan cara pandang yang sama di kawasan Asia-Pasifik untuk membahas kepentingan bersama. Peningkatan aktifitas diplomatik dimulai ketika Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney mengisyratkan ketertarikannya terhadap dialog empat negara pada awal tahun 2007 (Shanahan 2009). Setelah Perdana Menteri Australia John Howard melakukan konsultasi dengan Perdana Menteri Amerika Serikat Dick Cheney tentang potensi dialog empat negara, John Howard bersama Menteri Luar Negeri India Pranab Mukherjee segera pergi ke Jepang untuk menegaskan kembali momentum

dialog empat negara. Hal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Aso ke India dan Washington untuk membahas dan mengukuhkan dialog empat negara (Madan 2017). Peristiwa tersebut menjadi titik balik terbentuknya Quadrilateral Security Dialogue.

Pertemuan pertama Quadrilateral Security Dialogue diadakan pada Mei 2007 ketika para pejabat keempat negara berkumpul dalam pertemuan ASEAN Regional Forum di Manila. Pertemuan tersebut dicirikan sebagai pertemuan informal yang menyentuh bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama bagi keempat negara. Pertemuan tersebut selanjutnya diikuti dengan latihan militer Malabar, yang diikuti angkatan laut keempat negara dengan menampilkan pertukaran personel dan latihan pengendalian laut serta operasi multi-kapal induk (Buchan dan Rimland 2020). Secara lebih lanjut, pembentukan dialog empat negara tersebut justru mengundang protes diplomatik resmi dari otoritas Tiongkok kepada Australia, Amerika Serikat, Jepang dan India karena Tiongkok khawatir keempat negara tersebut bersama-sama membentuk aliansi keamanan (Nicholson 2007).

Skripsi ini meneliti tentang keputusan India untuk bergabung ke dalam Quadrilateral Security Dialogue pada 2007, hingga perkembangannya pada 2018 dengan menggunakan analisis Budaya Strategis.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, skripsi ini kemudian merumuskan rumusan masalah berupa sejauh mana keputusan India untuk bergabung ke dalam keanggotaan Quadrilateral Security Dialogue merupakan cerminan budaya strategis India Nehruvianisme?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keikutsertaan India di dalam Quadrilateral Security Dialogue merupakan cerminan dari budaya strategis India dan konsisten dalam menjelaskan perilaku India dalam keputusannya untuk bergabung di dalam Quadrilateral Security Dialogue

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Budaya Strategis

Terdapat empat generasi di dalam Budaya Strategis yang masing-masing memiliki argumen dan pendekatan yang berbeda satu sama lain (Anand 2020). Generasi pertama mengacu pada studi awal tentang budaya strategis yang muncul sekitar akhir 1970-an dan awal 1980-an. Secara umum, studi yang dilakukan pada generasi pertama ini dilakukan untuk menjelaskan perbedaan strategi nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Jack Snyder, Colin S. Gray dan David Jones adalah penstudi budaya strategis pada generasi pertama, dengan asumsi bahwa perbedaan dalam perilaku strategis suatu negara disebabkan oleh perbedaan pada kondisi geografi, pengalaman sejarah, dan budaya politik. Sementara Gray menilai budaya strategis Amerika Serikat berfokus pada pengalaman sejarah nasional, Jones menilai pada tingkat lingkungan makro berupa geografi dan sejarah, sosial, dan lingkungan mikro berupa organisasi.

Generasi kedua muncul pada pertengahan 1980-an sebagai kritik terhadap pandangan deterministik generasi pertama tentang budaya strategis, dimana generasi pertama berfokus pada instrumentalitas konsep belaka. Penstudi generasi kedua seperti Bradley S. Klein menjelaskan bahwa budaya strategis berfungsi sebagai alat untuk menipu negara lain agar percaya bahwa preferensi strategis mereka selaras dengan versi yang digambarkan dari budaya strategis mereka. Dalam hal ini, ada dua jenis strategi yang berbeda, yaitu strategi deklaratif yang bertindak sebagai umpan dan strategi operasional yang benar-benar dilaksanakan. Dalam beberapa tingkatan, sifat instrumental pada budaya strategis generasi kedua dapat berarti bahwa para aktor tidak dipengaruhi oleh budaya strategis, sehingga dapat memikirkan batasan-batasan dalam operasionalisasi (Anand 2020).

Generasi ketiga muncul pada 1990-an sebagai tanggapan atas kurangnya ketelitian metodologis pada generasi pertama. Pada generasi ketiga, budaya

strategis dianggap sebagai sumber penjelasan perilaku yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kerangka rasionalis. Menurut penstudi generasi ketiga seperti Alastair Iain Johnson, budaya strategis bekerja pada tingkat ideasional dan berbeda dari perilaku. Hal ini menyebabkan budaya strategis atau komponennya seperti politik-militer atau budaya organisasi menjadi variabel independen dan perilaku strategis menjadi variabel dependen. Hal ini juga menyebabkan variabel yang mempengaruhi perilaku strategis untuk diklasifikasikan sebagai variabel budaya atau non-budaya. Oleh karena itu, Johnston kemudian menggabungkan pendekatan positivis dengan konseptualisasi konstruktivis untuk menanamkan beberapa kekakuan metodologis ke dalam kajian budaya strategis. Eksposisi Johnston tentang budaya strategis Tiongkok sebagai “Realisme Budaya”, yang dicirikan oleh praktik realpolitik murni (Anand 2020)

Generasi keempat muncul pada akhir dekade pertama abad ke-21 sebagai tanggapan atas narasi homogenitas dan kontinuitas yang berlebihan dalam budaya strategis yang dipromosikan oleh generasi sebelumnya. Penstudi budaya strategis generasi keempat seperti Alan Bloomfield menggunakan kemungkinan adanya beberapa budaya strategis dalam suatu bangsa untuk mengusulkan konsep sub-budaya strategis dalam proses pengambilan keputusan. Menurut pandangan generasi keempat, hanya sub-budaya strategis yang dapat memberikan jawaban atas tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis yang dipilih sebagai yang dominan dalam memengaruhi mempengaruhi kebijakan (Anand 2020).

Skripsi ini menggunakan kerangka pemikiran budaya strategis yang dikemukakan oleh Alastair Ian Johnston. Johnston mendefinisikan budaya strategis sebagai suatu sistem simbol yang terintegrasi yang bertindak sebagai preferensi strategis yang meresap dan bertahan lama, dirumuskan dengan konsep peran dan kekuatan militer dalam urusan politik antarnegara, serta didukung dengan aspek faktualitas sehingga preferensi strategis tampak

realistis (Johnston 1995). Berkaitan dengan sistem simbol tersebut, selanjutnya terdapat dua bagian di dalam budaya strategis yang digagas oleh Johnston. Pertama adalah asumsi dasar tentang keteraturan lingkungan strategis, yaitu tentang peran perang dalam urusan manusia, tentang sifat musuh dan ancaman yang ditimbulkannya, dan tentang kemandirian penggunaan kekuatan. Kedua adalah asumsi pada tingkat yang lebih operasional tentang opsi strategis yang paling efektif untuk menghadapi lingkungan ancaman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya strategis yang dikemukakan oleh Johnston senantiasa berpengaruh pada perilaku negara.

1.4.2. Budaya Strategis India

Terdapat tiga interpretasi yang signifikan tentang budaya strategis India, (1) bahwa budaya strategis India cenderung bersifat pasif; (2) bahwa terdapat kekurangan budaya berpikir di dalam budaya strategis India; (3) bahwa India sesungguhnya memiliki budaya strategis yang kuat (Runa Das 2015). Sementara itu, Siv Shankar Menon menjelaskan bahwa India memiliki budaya strategis, dan hal yang sama, secara konsisten digunakan di dalam diplomasi bilateral dan multilateral. Secara lebih lanjut, terdapat dua arus utama di dalam budaya strategis India, yaitu plural dan demokratik sekuler, serta nasionalis Hindu. Plural dan sekuler dimaknai sebagai budaya strategis demokrasi yang mewakili dua aliran pemikiran yaitu Nehruvian dan Gandhian. Pemikiran strategis Nehruvian bersifat sinkretis dan inklusif terhadap segala sesuatu yang ada di titik kemerdekaan India. Etos budaya Hindu, Jainisme, sistem pemikiran Buddhis, serta nilai-nilai tambahan yang berasal dari ajaran Islam dan Kristen, telah membentuk inti dalam Nehruvianisme. Sementara Gandhian bersumber dari Ajaran Gita, Jainisme, dan Buddhisme yang berpengaruh dalam pertahanan nasional.

Budaya strategis demokrasi yang plural dan sekuler terus mempertahankan keyakinan yang teguh pada lembaga-lembaga demokrasi dan organisasi internasional dalam transformasi konflik dan pendekatan fundamentalnya

terhadap isu-isu keamanan yang bersifat defensif. Nilai-nilai inti dari aliran budaya strategis ini adalah otonomi strategis, kepercayaan pada organisasi regional dan internasional, kemampuan untuk mengurangi konflik serta penggunaan senjata yang terkalibrasi sebagai upaya terakhir untuk memastikan keamanan nasional. Sementara itu, budaya strategis nasionalis Hindu percaya pada realisme garis keras dan mendukung proyeksi kekuatan militer India di luar perbatasannya. Kaum Nasionalis Hindu tidak menerima pluralitas India, dan mereka menganggap bahwa India adalah tanah umat Hindu.

Secara lebih lanjut, persepsi nasionalisme sekuler kongres nasional India merupakan aliran dominan yang lebih inklusif, yang mengakui keragaman India. Hal ini selanjutnya menjadi landasan berpikir strategis lahirnya Nehruvianisme sebagai gagasan sekularisme yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah identitas nasional yang inklusif yang berasal dari pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan masyarakat India yang multikultur. Nehruvianisme memahami peran India dalam urusan luar negeri dalam istilah global, serta memahami India sebagai pendukung pan-Asianisme. Idealisme Nehruvianisme dalam hubungan internasional juga memiliki implikasi yang luas. Ian Hall (2016) menyebut bahwa Nehruvianisme menjadi tradisi berpikir budaya strategis yang dominan sejak kemerdekaan India pada 1947.

1.5. Argumentasi

Penulis berargumentasi bahwa keputusan India untuk bergabung ke dalam Quadrilateral Security Dialogue merupakan cerminan dan refleksi dari budaya strategis Nehruvianisme sebagai idealisme sekuler yang merepresentasikan identitas nasional, yang secara dominan turut menjadi kecenderungan nasional dan budaya strategis India, yang secara konsisten digunakan oleh India di dalam proses pengambilan keputusan

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan di dalam skripsi ini menggunakan metode yang dikemukakan oleh Alastair Ian Johnston. Johnston mengajukan *ranked preferences* di

dalam budaya strategis yang berperan sebagai batasan dalam pertimbangan opsi strategis (Johnston 1995). *Ranked preferences* digunakan karena dua alasan. Pertama adalah bahwa sangat mungkin terdapat tumpang tindih opsi strategis di dalam perumusan agenda kebijakan dalam suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, dengan menggunakan *ranked preferences*, peneliti dapat menimbang opsi strategis sebagai pilihan untuk menganalisis proses perumusan kebijakan di dalam masyarakat. Hal ini selanjutnya berkaitan dengan pemberian bobot dan peringkat yang berbeda pada setiap opsi strategis, mengingat terdapat perbedaan budaya strategis di dalam masyarakat. Asumsi tersebut selanjutnya memungkinkan untuk dilakukan pengujian konsistensi di dalam budaya strategis pada seluruh objek analisis di dalam masyarakat (Elkins dan Simeon dalam Johnston 1995). Pendekatan semacam ini juga dapat memberikan konsep budaya strategis yang dapat difalsifikasi, sehingga apabila *ranked preferences* tidak konsisten pada seluruh objek analisis, maka dengan demikian budaya strategis tunggal tidak dapat dikatakan ada. Sebaliknya, budaya strategis dapat dikatakan ada dan bertahan apabila ditemukan konsistensi di dalam *ranked preferences* pada seluruh objek analisis dari periode sejarah formatif hingga periode yang diteliti (Johnston 1995). Dengan demikian, secara sederhana, *ranked preferences* digunakan untuk memetakan perbedaan preferensi, dimana selanjutnya *ranked preferences* berguna untuk menguji konsistensi budaya strategis terhadap objek analisis yang sedang diteliti.

Kedua adalah bahwa penggunaan *ranked preferences* di dalam budaya strategis dapat menghasilkan hasil prediksi yang lebih eksplisit tentang pilihan perilaku masyarakat, alih-alih tidak menggunakan *ranked preferences*. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa dengan budaya strategis tertentu, maka suatu masyarakat atau negara memiliki preferensi untuk beberapa strategi tertentu, sehingga peneliti mampu untuk mengembangkan prediksi tentang perilaku yang dilakukan oleh masyarakat atau negara. Dengan demikian, secara sederhana, terdapat kemungkinan prediksi tentang opsi tindakan, atau dengan kata lain bahwa negara memiliki kecenderungan opsi tindakan yang bisa diprediksi. Definisi tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Johnston untuk menilai nilai analitik budaya strategis, yang meliputi konsep yang dapat

difalsifikasi; dapat memberikan prediksi empiris tentang pilihan strategis yang dapat diuji terhadap model pilihan lainnya; memiliki, referensi empiris seperti simbol dan preferensi peringkat yang dapat diamati dalam objek budaya strategis (teks, dokumen, doktrin); serta evolusinya dari waktu ke waktu dapat dilacak, selama seseorang dapat mengamati apakah generasi pembuat keputusan yang berurutan disosialisasikan dan berbagi ajaran dasar budaya strategis (Johnston 1995).

1.6.1. Definisi Operasional

1.6.1.1. Budaya nasional akan menentukan bagaimana keyakinan nasional terbentuk menentukan proses pengambilan keputusan, dan merefleksikan birokrasi dalam mengarahkan pengambilan keputusan rasional dalam kebijakan keamanan.

1.6.1.2. Identitas berkaitan dengan pandangan negara-bangsa tentang dirinya sendiri, yang terdiri dari karakter nasional, peran regional dan global, dan persepsi. Analisis budaya strategis mengasumsikan bahwa negara mungkin memiliki tujuan yang beragam berdasarkan pemahaman normatif tentang siapa mereka, dan peran apa yang harus mereka mainkan.

1.6.1.3. Nilai berkaitan dengan biaya dan/atau manfaat, bahan dan/atau faktor ideasional yang diprioritaskan, dan dipilih di atas yang lain.

1.6.1.4. Norma berkaitan denganodus perilaku yang diterima dan diharapkan.

1.6.1.5. Lensa perseptif yang berkaitan dengan keyakinan dan pengalaman atau kurangnya pengalaman dalam memandang dunia.

1.6.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah elaboratif, dimana selanjutnya penelitian ini memverifikasi proposisi keputusan India bergabung ke dalam Quadrilateral Security Dialogue sebagai refleksi dan konsistensi dari budaya strategis Nehruvianisme.

1.6.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan di dalam penelitian ini adalah keputusan India untuk bergabung di dalam Quadrilateral Security Dialogue pada 2007 hingga perkembangan Quadrilateral Security Dialogue pada 2018

1.6.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis konten yang bersumber dari tulisan, debat, pemikiran, dan pernyataan dari ahli strategi, pemimpin militer, dan elit keamanan nasional. Sumber data juga dapat dinukil dari desain dan dokumen penyebaran senjata, dokumen rencana perang, gambar-gambar dan simbol yang terpampang di berbagai media, upacara militer dan sastra perang (Johnston 1995). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan konten analisis, dengan menganalisis isi sampel objek dari periode yang diteliti, membandingkannya dengan sampel dari periode sebelumnya, dan menyesuaikannya dengan *ranked preferences*.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dalam bentuk analisis konten. Hal ini selanjutnya berhubungan dengan teknik pemetaan kognitif yang merupakan bagian dari analisis konten yang dikembangkan oleh Johnston (1995). Pemetaan kognitif adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengungkap keterkaitan antara aksioma kausal tertentu dan perkiraan efek perilaku. Pemetaan kognitif dirancang untuk menangkap struktur pernyataan kausal seseorang sehubungan dengan domain kebijakan tertentu, dan menghasilkan konsekuensi yang mengikuti dari suatu struktur kebijakan (Axelrod 1976 dalam Johnston 1995). Teknik analisis pemetaan kognitif melibatkan analisis yang ketat terhadap isi dokumen atau sampel dokumen tertentu. Penggunaan teknik analisis pemetaan kognitif dapat menggambarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat sebab-akibat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap argumen kausal yang lebih dalam yang mungkin dikaburkan oleh logika permukaan dan bahasa asal-asalan. Teknik pemetaan kognitif memungkinkan peneliti untuk melacak hubungan

antara berbagai jenis tindakan strategis dan hasil yang dianggap memiliki nilai positif dan negatif.

1.6.6. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori serta metodologi penelitian yang digunakan

BAB II membahas tentang Nehruvianisme sebagai Budaya Strategis India yang dominan, serta membahas bagaimana Nehruvianisme melihat sistem internasional, peperangan, dan kekuatan, diikuti dengan penjelasan tentang Quadrilateral Security Dialogue dari awal pembentukannya hingga perkembangannya

BAB III membahas tentang analisis Budaya Strategis India Nehruvianisme mengenai keputusan India untuk bergabung di dalam Quadrilateral Security Dialogue

BAB IV merupakan kesimpulan berdasarkan temuan serta hasil analisis pada bab-bab sebelumnya

BAB II

NEHRUVIANISME SEBAGAI BUDAYA STRATEGIS INDIA

2.1. Budaya Strategis India Nehruvianisme

2.1.1. Budaya Strategis India